

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGELUARAN PEMERINTAH
DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

Iis Apriliya Laska

01021181419021

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Iis Apriliya Laska

Nim : 01021181419021

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan


Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

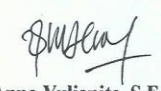
Dosen Pembimbing

Tanggal: 20 Maret 2018


Ketua: Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si

Nip. 196812241993031002

Tanggal: 10 Maret 2018


Anggota: Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Nip. 197007162008012015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Iis Apriya Laska
Nim : 01021181419021
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 26 Maret 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 27 Maret 2018

Ketua

Anggota

Anggota


Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
Nip. 196812241993031002


Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Nip. 197007162008012015


Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
NIP. 197306072002121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Stihel, M.Si

NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Apriliya Laska
Nim : 01021181419021
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Kota
Palembang.

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
Anggota : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Tanggal ujian : 26 Maret 2018

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.


Indralaya, 26 Maret 2018

METERAI
TEMPEL
77C4DAEF950923401
6000
TUAS
RUPIAH

Pembuat Pernyataan.

Iis Apriliya Laska
01021181419021

RIWAYAT HIDUP

	Nama Mahasiswa : Iis Apriliya Laska
	Jenis Kelamin : Perempuan
	Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 14 April 1996
	Agama : Islam
	Status : Belum Menikah
	Alamat : Jl. Rejang, Perumahan Green Hill Badar Agung Rt. 009 Rw. 003 Kab. Lahat
	Email : iisapriyalaska@yahoo.co.id
PENDIDIKAN FORMAL	
2001-2002	TK Muhamadiyah Lahat
2002-2008	SD Negeri 1 Lahat
2008-2011	MTS Negeri Lahat
2011-2014	SMA Negeri 2 Lahat
2014-2018	Universitas Sriwijaya
Pengalaman Organisasi	Anggota Taekwondo Universitas Sriwijaya
Penghargaan Prestasi	<ul style="list-style-type: none">- Juara III Kyourugi U.53 Putri Antar Perguruan Tinggi Se-Sumsel dan Pelajar Se-Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016- Juara II Poomsae Beregu Putri Antar Perguruan Tinggi Se-Sumsel dan Pelajar Se-Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016- Peserta PORKAB I Ogan Ilir Sebagai Atlit Taekwondo U. 53 PUTRI Tahun 2017- Juara II Kyourugi U.68 Putri Antar Perguruan Tinggi Se-Sumsel dan Pelajar Se-Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang periode 2001-2016.

Indralaya, Maret 2018

Iis Apriliya Laska

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si dan ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Suhel, M.Si
3. Sekertaris Jurusan Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
4. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Bapak DRS. Nazeli Adnan, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.
7. Kedua Orang tua, Bapak Drs. Salman dan Ibu Dra. Susulawati, Kakak; Wahida Laska Susanti S. Kom dan Adik-adikku; Rizky Sabrina Laska, M. Akbar Laska, Rahmad Ramadhan Laska.
8. Sahabat-sahabatku: Anika, Dwi, Mayang, Komariyah, Annisa, Septi, Ira, Dian, Dilla, Lidya, Sabem Ratu, Suci, Yuni, Denu dan rekan-rekan EP 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Indralaya, Maret 2018

Iis Apriliya Laska

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah
di Kota Palembang

Oleh:


Iis Apriliya Laska; Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.; Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin secara bersama-sama signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang, sedangkan variabel dana perimbangan, PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang. Variabel dana perimbangan dan PDRB per kapita bentuk pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah adalah positif, sedangkan variabel jumlah penduduk miskin bentuk pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah adalah negatif.

Kata Kunci: *Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB per Kapita, dan Jumlah Penduduk Miskin.*

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
Nip. 196812241993031002


Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Nip. 197007162008012015

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Suhel, M.Si

NIP. 196610141992031003

ABSTRACT

Analysis of Factors Influencing Government Spending
in Palembang.

By:

Iis Apriliya Laska; Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.; Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.

This study aims to determine how the influence of local revenues, equalization funds, the GDP per capita and the number of poor people against government spending in Palembang. The data used in this research is secondary data obtained from the publication of the Central Statistics Agency (BPS), and Directorate General of Fiscal Balance (DJPB). The analysis technique used in this research is multiple regression estimated by Ordinary Least Square (OLS). These results indicate that local revenues, equalization funds, the GDP per capita and the number of poor people together significantly affect government spending in Palembang. In partial local revenues do not significantly affect government spending in Palembang, while variable equalization fund, the GDP per capita and the number of poor people significantly affect government spending in Palembang. Variable fund balance and the GDP per capita forms of influence on government expenditure is positive, while variable number of poor form of influence on government spending is negative.

Keywords: *Government Spending, Local Revenue, Fund Balance, The GDP Per Capita, And The Number Of Poor People.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS)	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	13
2.1.2 Belanja Daerah	18
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.1.4 Dana Perimbangan.....	22
2.1.5 PDRB per Kapita	24
2.1.6 Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	36
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Teknik Analisis	37
3.4.1 Uji Asumsi Klasik	39
3.4.2 Uji Statistik.....	41
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum	44
4.1.1 Karakteristik Kota Palembang.....	44

4.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang	47
4.1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang	48
4.1.4 Perkembangan Dana Perimbangan di Kota Palembang.....	49
4.1.5 Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Palembang	51
4.1.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang	52
4.2 Hasil Estimasi.....	55
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	56
4.2.1.1 Uji Multikolinearitas	56
4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.2.1.3 Uji Autokorelasi	59
4.2.2 Pengujian Statistik	60
4.2.2.1 Uji F	60
4.2.2.2 Uji t	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang	63
4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang	64
4.3.3 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang	65
4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Palembang	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2011-2016.....	4
Tabel 1.2 Total Pengeluaran Pemerintah Kota Palembang Tahun 2011-2016	6
Tabel 1.3 PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun 2011-2016.....	8
Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2011-2016	10
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Palembang.....	46
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Wagner	15
Gambar 2.2 Teori Peacock dan Wiseman	17
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Total Pengeluaran pemerintah Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	47
Gambar 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	49
Gambar 4.3 Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	50
Gambar 4.4 PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	52
Gambar 4.5 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	53
Gambar 4. 6 Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2001-2016.....	54
Gambar 4.7 Diagram Hasil Uji t.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Total Pengeluaran Pemerintah Kota Palembang Tahun 2000-2016	75
Lampiran 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2000-2016	76
Lampiran 3. Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2000-2016.....	77
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun 2000-2016.....	78
Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2000-2016.....	79
Lampiran 6. Uji White Heterokedastisitas	80
Lampiran 7. Uji Autokorelasi <i>Lagrangre Multiplier</i>	81
Lampiran 8. Hasil Estimasi Regresi Auxiliry	82
Lampiran 9. Hasil Estimasi Regresi Auxiliry	83
Lampiran 10. Hasil Estimasi Regresi Auxiliry.....	84
Lampiran 11. Hasil Estimasi Regresi Auxiliry.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak tahun 2001 merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah. Otonomi daerah bukan semata-mata merupakan penambahan urusan yang diserahkan, akan tetapi seberapa besar wewenang yang diserahkan tersebut memberikan kemampuan mengambil alih dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk desentralisasi fiskal sehingga daerah dapat mengurangi derajat ketergantungan kepada pusat dan dapat membiayai kegiatan pembangunan daerahnya (Sasana, 2011: 47).

Derajat otonomi fiskal di Kabupaten dan Kota pada umumnya masih rendah. Hal ini tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang masih rendah, artinya Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing Kabupaten dan Kota belum mampu untuk membiayai keseluruhan belanja rutin daerahnya. Pengukuran derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dengan menghitung Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah tanpa transfer (Tangkilisan, 2005).

Menurut Halim (2001) ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu (1). Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah

harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan, dan pendapatan lain-lain (Mayangsari, at al., 2014: 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik (Novianto dan Rafiudin, 2015: 2-3).

Permasalahan yang terjadi saat ini ialah pemerintah daerah terlalu menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Disaat dana transfer yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya dana transfer yang diperoleh tetap atau lebih dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah menurut Sasana (2011: 47) seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya insentif pencarian sumber-sumber untuk menutupi biaya daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai Pendapatan Asli Daerah yang mampu dikumpulkan oleh daerah.

Kota Palembang selama melaksanakan otonomi dan desentralisasi juga mengalami hal yang sama, yaitu relatif rendahnya kemandirian di bidang pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah selama tahun 2011 sampai dengan 2016 di kota Palembang, berikut adalah rinciannya:

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Palembang
Tahun 2011-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)
2011	3.693.640	10.930.955
2012	5.211.327	12.438.593
2013	5.587.048	14.565.891
2014	7.342.186	15.452.947
2015	7.372.378	14.618.248
2016	7.813.823	18.637.367

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang, Palembang dalam Angka, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Diolah.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama 2011 hingga 2016 terjadi peningkatan dana perimbangan di Kota Palembang yang cukup besar, dimana dana perimbangan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2011, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar Rp 10.930.955 juta. Nilai dana perimbangan tertinggi di transfer pemerintah pusat pada tahun 2016 mencapai Rp 18.637.367 juta. Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, mengalami peningkatan sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini mencerminkan adanya ketergantungan yang besar Kota Palembang terhadap pemerintah pusat.

Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan ekonomi dan besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan pemerintah di daerah masih belum bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan penentuan skala prioritas pembangunan seringkali masih didominasi dan diarahkan oleh pemerintah pusat sehingga kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Adanya Undang-Undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2004 menjadikan titik tolak adanya pencerahan kehidupan ekonomi bagi masyarakat daerah. Menurut Pramuka (2010: 2) Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan dana perimbangan dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan dana perimbangan dalam jumlah yang kecil. Bantuan transfer dana ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana dari pemerintah pusat pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Anggaran untuk daerah dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efisiensi belanja daerah akan terlihat dengan peningkatan manfaat penggunaan anggaran belanja daerah baik yang bersifat pengeluaran rutin maupun yang bersifat pengeluaran pembangunan. Apabila efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah dapat dicapai dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat di daerah secara umum dapat tercapai.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan yang ada di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada pasal 67 ayat 5. Belanja operasional daerah diupayakan tidak melampaui pendapatan dalam tahun

anggaran yang bersangkutan dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya (Mayangsari, at al., 2014: 2).

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan yang bersumber dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Dari sisi pengeluaran dalam struktur keuangan daerah, perkembangan belanja daerah Kota Palembang tahun 2011-2016 terlihat dalam Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Total Pengeluaran Pemerintah Kota Palembang Tahun 2011-2016

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)
2011	18.746.484
2012	17.371.107
2013	25.547.430
2014	28.124.653
2015	28.698.936
2016	29.159.661

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang, Palembang dalam Angka berbagai Edisi.

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Kota Palembang selama tahun 2011-2016 secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan di daerah.

Pengeluaran pemerintah yang meningkat ditujukan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah, dalam pembangunan ekonomi daerah dapat meningkatkan pendapatan per kapita, pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah (Mangkoesoebroto, 1993). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di daerah, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, Perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa, dan perkembangan produksi barang modal yang berlangsung dalam waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (BPS, 2014).

Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah dan diyakini sebagai indikator dalam menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil RDRB merupakan cerminan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sedangkan pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi ditentukan oleh fasilitas pendidikan dan taraf pendidikan yang dicapai, taraf kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur, serta tersedianya pekerjaan yang cukup merupakan faktor untuk melihat kesejahteraan ekonomi daerah tercapai (Sukirno, 2013).

Kenaikan pada besaran PDRB per kapita menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan masyarakat pada umumnya mengalami peningkatan. Tinggi rendahnya besaran indikator ini dipengaruhi oleh faktor besaran PDRB yang dihasilkan suatu wilayah serta jumlah penduduk wilayah tersebut. Secara umum semakin besar

PDRB suatu daerah maka semakin besar nilai PDRB per kapita daerah tersebut. Dengan hasil perhitungan PDRB per kapita Kota Palembang diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian Kota Palembang yang sesungguhnya.

Tabel 1.3 PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun 2011-2016

Tahun	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
2011	43.502.961
2012	48.295.680
2013	54.658.203
2014	61.218.828
2015	68.486.419
2016	74.135.203

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang, Data diolah dari Palembang dalam Angka berbagai Edisi.

Berdasarkan Tabel 1.3 PDRB per kapita penduduk Kota Palembang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 naik sebesar Rp 5.648.784 juta atau naik dari Rp 68.486.419 juta di tahun 2014 menjadi Rp 74.135.203 juta. Secara umum perekonomian Kota Palembang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran.

Letak Kota Palembang yang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antara daerah di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Hal lain ditunjang dengan keberadaan Bandara yang melayani penerbangan internasional sehingga membuka peluang bagi warga Kota Palembang mendapatkan akses langsung dengan luar negeri. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana

transportasi dan perdagangan antar wilayah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan dukungan daerah sekitar Kota Palembang, seperti Banyuasin dan Kab. Ogan Ilir dapat memacu pertumbuhan industri dan perdagangan/jasa di Kota ini. Belum lagi dengan luas wilayah yang masih dapat direncanakan pengembangan sektor strategis dengan dukungan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas perekonomian Kota (BPS, 2014).

Namun, suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang yang sangat pesat diharapkan dapat mewujudkan tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang banyak dialami oleh daerah-daerah terutama di Kota Palembang.

Menurut Todaro (2011) kemiskinan timbul dari kombinasi pendapatan per kapita yang rendah dan tingginya ketimpangan distribusi dari pendapatan itu. Dalam distribusi pendapatan dimana pun, semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita maka akan semakin rendah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dimaksud yaitu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin tingkat kemiskinan lebih rendah.

Terlepas dari semua itu, Pemerintah Kota Palembang pada saat ini berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan membawa Kota ini kedalam golongan Kota metropolitan dengan jumlah penduduk miskin cukup rendah. Penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 13,74 persen dari 1,5 juta penduduk di Kota Palembang, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 14,3 persen, angka ini terus

bergerak menurun setiap tahunnya. Berikut adalah penggambaran jumlah penduduk miskin di Kota Palembang.

Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase (%)
2011	210	14.3
2012	206.5	13.59
2013	206	13.36
2014	202.31	12.93
2015	203.12	12.83
2016	191.95	12.04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang.

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Jumlah penduduk miskin di Kota Palembang secara keseluruhan terus mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Dengan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun artinya program pembangunan pemerintah Kota Palembang dijalankan dengan baik.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat lepas dari penciptaan stabilitas ekonomi sebagai landasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat (Bappenas, 2011).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, mengingat pentingnya pengeluaran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerahnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam belanja pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per Kapita terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang.

4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran atau kondisi serta manfaat dalam memperkaya wawasan terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Kota Palembang. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, PDRB per Kapita, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Arwati, Dini dan Novita, Hadiati. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat". ISBN: 979-26-0266-6.

Bappenas. 2011. *Bab III Kaji Ulang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. <https://www.bappenas.go.id/files/2813/5229/9755/bab3snpk11juni.pdf> (diakses pada tanggal 3 November 2017)

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2001. *Palembang dalam Angka 2001*. BPS: Palembang.

_____. 2002. *Palembang dalam Angka 2002*. BPS: Palembang.

_____. 2003. *Palembang dalam Angka 2003*. BPS: Palembang.

_____. 2005. *Palembang dalam Angka 2005/2006*. BPS: Palembang.

_____. 2006. *Palembang dalam Angka 2007*. BPS: Palembang.

_____. 2008. *Palembang dalam Angka 2009*. BPS: Palembang.

_____. 2009. *Palembang dalam Angka 2010*. BPS: Palembang.

_____. 2010. *Palembang dalam Angka 2011*. BPS: Palembang.

_____. 2011. *Palembang dalam Angka 2012*. BPS: Palembang.

_____. 2012. *Palembang dalam Angka 2013*. BPS: Palembang.

_____. 2013. *Palembang dalam Angka 2014*. BPS: Palembang.

_____. 2014. *Palembang dalam Angka 2015*. BPS: Palembang.

_____. 2015. *Palembang dalam Angka 2016*. BPS: Palembang.

_____. 2016. *Palembang dalam Angka 2017*. BPS: Palembang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota 2010-2013*. BPS: Sumatera Selatan.

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Jumlah Penduduk Miskin Palembang 2008-2014*. BPS: Palembang.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2002-2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2002-2016*. BPS: Palembang.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (diunduh pada tanggal 11 Oktober 2017).
- Djannata, Andika Azzi. 2012. "Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi Ketiga. Erlangga. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hasan, T. Iskandar Ben & Zikriah. 2010. "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh". *Journal SAINS Riset*, Vol 1 No. 13.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Mayasari, L. P. R., Ni Kadek S., dan Gede, A. Y. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng". *E-Journal Ak*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1.
- Novianto, Riko dan Rafiudin, Hanafiah. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No.1, ISSN: 2302-7169.

- Patra, I Ketut dan Nurlinda, Sabani. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pembangunan di Kota Palopo". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 03, No. 01, ISSN 2339-1529.
- Pramuka, B. Agus. 2010. "Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1.
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Bagian V Teori Pengeluaran Pemerintah*. www.ferryfebup.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Pengeluaran-Pemerintah.pdf (diunduh pada tanggal 11 November 2017).
- Pratiwi, Saruni dan Ketut, Sutrisna. 2014. "Pengaruh PDRB per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 10, ISSN: 2303-0178.
- Sasana, Hadi. 2011. "Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, ISSN: 1412-3126.
- Sawitri, Hendrin Hariati. 2007. *Ekonomi Pembangunan 1*, Edisi Kesatu. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tayeh, Sultan N. Abu dan Mairna, H. Mustafa. 2011. "The Determinants of Public Expenditures in Jordan". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 8.
- Todaro, Michael P dan Stephen, C. Smith. 2011. "Pembangunan Ekonomi", Jilid 1, Edisi 11. Terjemahan oleh: Agus Dharma. Erlangga, Jakarta.
- Wahyudi. 2011. "Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan". *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta.

Widia, Very. 2012. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Muara Enim”. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasikan).

Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Wirawan dan Sudarsana. 2015. “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4. No. 5, ISSN: 2303-0178.

_____, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 Tentang *Luas Wilayah Kota Palembang*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Pemekaran Kelurahan*.

_____, Republik Indonesia, Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang *Pemekaran Kecamatan*.